

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal
--	---

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target s.d. Triwulanan III 2026	Realisasi s.d. Triwulan III 2026	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)	Persentase	100%	75%	80%	106%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	Persentase	100%	75%	85%	113%
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal</i>					
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%
III.	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional</i>					
3.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	92%	60%	60%	100%

Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED); dan
2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Persentase

Efektifitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan untuk

Investor Relation

Unit (IRU) dan

Recent Economic

Development (RED)

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan dan rumusan kebijakan yang terkait melalui dokumen yang relevan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis

proses dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan I (Januari-Maret) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Macroeconomic Sector*;
- RED Triwulan I (Januari-Maret) yang difokuskan pada perkembangan ekonomi global dan perdagangan Internasional;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Kebijakan Perdagangan Global.
- Beberapa isu ataupun substansi terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak

terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan II (April-Juni) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Real Sector & Investment Environment*;
- RED Triwulan II (April-Juni) yang difokuskan pada Ketahanan Sektor Eksternal di awal tahun 2026;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;

- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan III (Juli-September) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Financial & External Sector*; dan
- RED Triwulan III (Juli-September) yang difokuskan pada investasi.
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan IV (Oktober – Desember) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Economic Structural Reform & Transformation*;
- Recent Economic Development (RED) Triwulan IV (Oktober – Desember) yang difokuskan pada Strategi kebijakan Pemerintah; dan
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit (IRU)* dan *Recent Economic Development (RED)*

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit (IRU)* dan *Recent Economic Development (RED)*

Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED) dihitung setiap triwulan. Target kinerja tahun 2026 sebesar 100%, ditetapkan berdasarkan perkiraan dan target kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Target kumulatif Triwulan III sebesar 75%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk IRU dan RED yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 106% atau mencapai 80% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit (IRU)</i> dan <i>Recent Economic Development (RED)</i>	Persentase	100%	80%	106%

Investor Relation Unit (IRU)

Presentation Book (PB) IRU menjadi sarana komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan investor, analis, dan pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan pemerintah dipahami dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan informasi investor. Sesuai Manual IKU, pada Triwulan III (Tahapan Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan) PB IRU difokuskan pada pembahasan *Financial & External Sector*. Setiap edisi terdiri dari dua bagian, yaitu pembaruan makroekonomi (*Macroeconomic Updates*) dan pembaruan kebijakan (*Policy Updates*). Pada triwulan ini telah disusun PB IRU edisi Juli, Agustus, dan September 2026, dengan rincian sebagai berikut:

- Edisi Juli 2026 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Surat Nomor EKM.02.07/22/D.II.M.EKON.6/06/2026 tanggal 30 Juni 2026.
- Edisi Agustus 2026 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Surat Nomor EKM.02.07/25/D.II.M.EKON.6/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026.
- Edisi September 2026 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Surat Nomor EKM.02.07/29/D.II.M.EKON.6/09/2026 tanggal 2 September 2026.

1. Koordinasi Materi PB IRU

- Koordinasi materi tetap berpedoman pada Nota Dinas Nomor EKM.06/63/D.II.M.EKON.6/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Permohonan Update Kebijakan, dilanjutkan secara informal dengan unit terkait untuk menghimpun data dan informasi tambahan.
- *Dedicated Team Meeting* (DTM) IRU dilaksanakan pada 13 Juli 2026 di Bali.
- Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan DTM IRU untuk pertemuan dengan *Rating and Investment Information, Inc. (R&I)* pada Oktober 2026 dilaksanakan pada 15 September 2026 di Mövenpick Hotel Jakarta City Centre.
- Rapat Koordinasi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dilaksanakan pada 28–29 September 2026 di Bandung.

2. Penyusunan PB IRU

- PB IRU selalu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu analisa makroekonomi dan kebijakan reformasi struktural.
- Pada bagian analisa makroekonomi, dilakukan perhitungan dan analisa untuk data terbaru PDB dan inflasi secara global. Sedangkan pada data makroekonomi Indonesia, dilakukan perhitungan dan analisa untuk data terbaru investasi, indeks keyakinan konsumen, cadangan devisa, dan perdagangan.
- Pada bagian kebijakan reformasi struktural, menyampaikan isu-isu yang dianggap menjadi perhatian investor, seperti paket kebijakan ekonomi, kebijakan dalam pengendalian inflasi, kebijakan fiskal, kebijakan ekspor & impor, kebijakan investasi, kebijakan ekonomi digital, kebijakan tenaga kerja, kebijakan hubungan luar negeri, PSN, kebijakan hilirisasi, dan kebijakan ekonomi hijau.
- Dalam perkembangannya, dengan dasar koordinasi yang telah dilakukan, Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal menganalisa isu-isu yang relevan

untuk dipertahankan atau ditambahkan pada PB IRU dan mengurangi isu yang sudah tidak menjadi perhatian.

- Berdasarkan pada hal tersebut di atas, Pada masa triwulan II ini, dinilai penting untuk menambahkan isu mengenai kepariwisataan *dan economic vehicle*, serta mempertajam isu investasi dan hilirisasi, kerjasama ekonomi, dan transisi energi.

Recent Economic Development (RED)

Penyusunan RED/Perkembangan Ekonomi Terkini merupakan publikasi rutin untuk menyajikan rangkuman data, informasi, dan analisis mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dan global serta mengkomunikasikan strategi dan kebijakan Pemerintah Indonesia terkini. Selama triwulan III telah dilakukan penyusunan RED sebanyak 2 edisi (bulan Agustus dan September). RED tersebut juga telah disampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian dan disebarkan kepada unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai referensi dan informasi perkembangan ekonomi terkini. Selain itu, RED ini juga telah di publikasikan dalam website Kemenko Bidang Perekonomian dan bisa diakses oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi <i>Investor Relations Unit</i> (IRU) dan Penyusunan Laporan bulanan <i>presentation book</i> IRU (edisi Juli, Agustus, dan September) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Financial & External Sector</i>	Terlaksana	<i>Presentation Book</i> IRU edisi Juli–September 2026 telah disusun dan disampaikan kepada Bank Indonesia serta dipublikasikan melalui website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Koordinasi dilaksanakan melalui DTM IRU (13 Juli 2026, Bali), Rakor Penyiapan Bahan DTM IRU (15 September 2026, Jakarta), dan Rakor NPI (28–29 September 2026, Bandung).
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan III yang difokuskan pada investasi	Terlaksana	RED Triwulan III 2026 (edisi Agustus dan September) telah disusun dan disampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian,

			Bapak Deputi serta dipublikasikan melalui website Kemenko Bidang Perekonomian serta didistribusikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
--	--	--	---

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan FGD "Perspektif Pasar terhadap Dinamika Makro-Fiskal dan Pembiayaan Indonesia" pada 24 September 2026 dengan narasumber dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk memperoleh perspektif pasar sebagai bahan penyusunan RED dan PB IRU.
2. Mengikuti seminar Bloomberg 101 pada 30 September 2026 di Jakarta untuk meningkatkan pemanfaatan data Bloomberg dalam penyusunan RED dan PB IRU.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya rapat dilaksanakan menggunakan *zoom meeting* dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi para pegawai di lingkup Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, penyimpanan dan dokumen serta keperluan administrasi persuratan menggunakan e-dokumen, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp18.200.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah tidak dapat dialokasikannya perpanjangan Bloomberg dan CEIC di unit Keasdepan Ekonomi Makro dan Fiskal sehingga ketika penyusunan RED dan IRU membutuhkan waktu yang lebih lama. Langganan Bloomberg dan CEIC hanya boleh dilakukan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Pembaruan sebagian materi PB IRU dan RED masih bergantung pada data dan materi unit lain

Rumusan rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan IV 2026 sehingga dapat mempublikasikan *Presentation Book* IRU dan RED di website Kemenko Bidang Perekonomian sesuai dengan jadwal yang ditentukan (*on time*).
2. Akses Bloomberg dan CEIC agar lebih mudah diakses secara bergantian dengan unit kerja lain di lingkup Kemenko Bidang Perekonomian.

1.2.1. Terwujudnya

**Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Ekonomi Makro dan
Fiskal yang
Berkualitas**

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis prespektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, dan Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan perencanaan program dan rumusan kebijakan yang terkait (*data analisis*, *policy brief*, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional dan investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah :

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait pembiayaan;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait penerimaan negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, perdagangan internasional dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25% untuk triwulan I, 50% untuk triwulan II, 75% untuk triwulan III, dan 100% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 113% (melampaui batas) atau mencapai 85% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU.1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	Persentase	100%	85%	116%

Diagnosa Ekonomi Makro

Diagnosa Ekonomi Makro pada tahun 2026 diarahkan untuk menghasilkan analisis dan bahan rekomendasi kebijakan terkait perkembangan ekonomi makro, perdagangan internasional, dan investasi, dengan dukungan pengembangan metode proyeksi ekonomi. Pada triwulan III tahun 2026, diagnosa ekonomi makro difokuskan pada perdagangan internasional sesuai dengan rencana aksi, dengan memperhatikan ketidakpastian ekonomi global dan fragmentasi ekonomi. Analisis yang dihasilkan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan IKU Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Pelaksanaan diagnosa ekonomi makro oleh Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal pada triwulan III tahun 2026 dilakukan melalui:

1. Koordinasi Isu Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional

- FGD "Dinamika Global Trade dan Strategi Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia" dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 di FEM IPB University, Bogor, dengan narasumber Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si. dan Mohammad Faisal, Ph.D. Hasilnya disampaikan kepada Deputy tanggal 10 Agustus 2026.
- Penyampaian laporan hasil pengharmonisasian pengaturan tarif bea masuk dalam kerangka *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) pada 27 Juli 2026 serta laporan implementasi peraturan turunan Protokol Perubahan IJEPA pada 10 Agustus 2026, sebagai keluaran dukungan koordinasi pengaturan perdagangan Indonesia–Jepang
- Penyampaian masukan terhadap konsep OECD *Economic Survey of Indonesia* 2026 pada 10 Juli 2026 kepada Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral.
- Penyampaian tanggapan terhadap matriks isu pembahasan HLTF-EI ke-50 dan pertemuan terkait pada 19 Agustus 2026 kepada Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional, sebagai bahan koordinasi pembahasan integrasi ekonomi ASEAN.

- e. Penyampaian bahan referensi bilateral data perdagangan dan investasi Indonesia-Albania, sebagai dukungan koordinasi kerja sama ekonomi bilateral.

2. Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro

- a. Pengembangan model proyeksi indikator makroekonomi jangka menengah (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) bersama FEB Universitas Indonesia melalui bimbingan teknis pada 15 Juli, 23 Juli, 29 Juli, dan 4 September 2026.
- b. Bimbingan Teknis Kerangka Evaluasi Dampak Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Indonesia pada 9 September 2026 di Ruang Pareto Auditorium, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dengan narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, didahului rapat koordinasi persiapan tanggal 27 Agustus 2026.
- c. Monitoring dan evaluasi dampak investasi terhadap perekonomian dan kapasitas fiskal daerah di Kabupaten Indramayu pada 2 September melalui koordinasi dengan BAPPERIDA dan DPMPTSP.
- d. Penyusunan dan presentasi hasil riset pasar modal Swedia terkait kekhawatiran dunia usaha terhadap intervensi regulasi Uni Eropa, sebagai bahan pembelajaran dan referensi kebijakan pengembangan pasar modal Indonesia.
- e. Penyampaian tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan pada 20 Agustus 2026, mencakup asumsi dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta arah kebijakan fiskal, sebagai bahan penyusunan jawaban Pemerintah dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
- f. Permintaan data konsumsi listrik nasional periode Juni 2026 kepada PT PLN (Persero) dan data harga jual eceran BBM kepada Pertamina Patra Niaga pada 7 Juli 2026, data Surat Keterangan Asal dari Pusdatin Kementerian Perdagangan serta permintaan data SUSENAS tahun 2026 pada 29 September 2026. Permintaan data tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan data pendukung analisis ekonomi makro.

Ketahanan Fiskal

Ketahanan Fiskal pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan keberlanjutan program prioritas nasional. Pada Triwulan III Tahun 2026, sesuai Manual IKU, fokus diarahkan pada penerimaan negara, dengan tetap mengoordinasikan agenda belanja negara, pembiayaan, dan tata kelola APBN. Upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi pada triwulan III tahun 2026, dengan beberapa area yaitu:

1. Optimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Perpajakan

- a. FGD Harmonisasi Skema Insentif Fiskal Sepeda Motor Listrik: Sinkronisasi Konversi, *Trade-In*, dan Bantuan Pembelian Motor Baru, dilaksanakan pada 8 Juli 2026.
- b. Diskusi *Global Minimum Tax* dengan World Bank, dilaksanakan pada 9 Juli 2026.

- c. Rapat Pembahasan dan Tindak Lanjut RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dilaksanakan pada 9 Juli dan 10 September 2026.
- d. FGD “Merancang Cukai Emisi Kendaraan Bermotor untuk Mendukung Dekarbonisasi Transportasi dan Memperkuat Penerimaan Negara”, dilaksanakan pada 28 Juli 2026.
- e. FGD Instrumen Fiskal Percepatan Realisasi Program Tahun 2026 dan Strategi Keberlanjutan Insentif Fiskal Sepeda Motor Listrik, dilaksanakan pada 30 Juli 2026.
- f. FGD Pembahasan Masukan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan pada 4 Agustus 2026.
- g. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, dilaksanakan pada 26 Agustus 2026.
- h. Rapat Pembahasan RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, dilaksanakan pada 1 September 2026.
- i. Rapat Harmonisasi RPMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah TA 2027, dilaksanakan pada 2 September 2026.
- j. Rapat Pengharmonisasian RPMK tentang Perencanaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Bersumber dari Bagian Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dilaksanakan pada 11 September 2026.
- k. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 165 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda dalam Rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, dilaksanakan pada 25 September 2026.

2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- a. Rapat Pembahasan PAK RPP PNBP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dilaksanakan pada 1 Juli, 7 Juli, dan 21 Juli 2026.
- b. Rapat Pembahasan dan Harmonisasi PAK RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan pada 8 Juli, 15 Juli, 13 Agustus, 20 Agustus, 27 Agustus, dan 30 September 2026.
- c. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan pada 14 Juli 2026.
- d. Rapat Pembahasan PAK RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia, dilaksanakan pada 16 Juli 2026.

- e. Rapat Pembahasan PAK Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada BIG, dilaksanakan pada 17 Juli, 5 Agustus, 18 Agustus, 26 Agustus, 3 September, dan 30 September 2026.
- f. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Juknis Akuntansi PNBPN dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilaksanakan pada 21 Juli 2026.
- g. Rapat Pembahasan PAK RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dilaksanakan pada 22 Juli 2026.
- h. Rapat Pembahasan dan Finalisasi RPP tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dilaksanakan pada 23 Juli 2026.
- i. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada BMKG, dilaksanakan pada 20 Juli 2026.
- j. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Hak Negara Lainnya yang Berlaku pada Kementerian ESDM, dilaksanakan pada 4 Agustus 2026.
- k. Uji Publik RPP PNBPN pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dilaksanakan pada 11 Agustus 2026.
- l. Uji Publik Usulan RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kemendikdasmen, dilaksanakan pada 19 Agustus 2026.
- m. Rapat Pembahasan Tingkat PAK Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada BNPB, dilaksanakan pada 3 September 2026.
- n. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dilaksanakan pada 8 September 2026.
- o. Rapat Pembahasan PAK Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KPPU, dilaksanakan pada 9 September 2026.
- p. Rapat Harmonisasi RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dilaksanakan pada 9 September 2026.

3. Peningkatan Tata Kelola Belanja Negara, Transfer ke Daerah, dan Pelaporan Keuangan

- a. Rapat Harmonisasi tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat, dilaksanakan pada 7 dan 15 Juli 2026.
- b. Rapat Harmonisasi RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dilaksanakan pada 8 Juli dan 16 September 2026.
- c. Rapat PAK dan Harmonisasi RUU tentang APBN TA 2027, dilaksanakan pada 28 Juli, 30 Juli, 5 Agustus, dan 10 Agustus 2026.
- d. Rapat Harmonisasi RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN TA 2026, dilaksanakan pada 18 Agustus 2026.

- e. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakan pada 14 Juli 2026.
- f. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi, dilaksanakan pada 24 Agustus 2026.
- g. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, dilaksanakan pada 31 Agustus 2026.
- h. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, dilaksanakan pada 7 Agustus 2026.
- i. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, dilaksanakan pada 10 Agustus 2026.
- j. Rapat Harmonisasi RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN TA 2026, dilaksanakan pada 18 Agustus 2026.
- k. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman, dilaksanakan pada 1 September 2026.
- l. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan, dilaksanakan pada 23 September 2026.
- m. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka Pemenuhan Alokasi Dana Desa, dilaksanakan pada 23 dan 29 September 2026.
- n. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, dilaksanakan pada 30 September 2026.

4. Pembiayaan dan Investasi Pemerintah

- a. Rapat Harmonisasi tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat, dilaksanakan pada 7 dan 15 Juli 2026.
- b. Rapat Pengharmonisasian, Pambulatan, dan Pementapan Konsepsi RPermen PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Pembangunan Inovatif, dilaksanakan pada 29 Juli dan 13 Agustus 2026.
- c. Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman, dilaksanakan pada 1 September 2026.
- d. Rapat Pleno Pengharmonisasian RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Defisit APBD, dan Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2027, dilaksanakan pada 7 September 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi dan penyusunan Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional	Terlaksana	FGD Global Trade (5 Agustus 2026, Bogor; hasil melalui ND /123 tanggal 10 Agustus 2026), Bimtek Evaluasi Dampak Perjanjian Kerja Sama Ekonomi (9 September 2026), laporan implementasi IJEPA (ND /125 tanggal 10 Agustus 2026), masukan OECD <i>Economic Survey</i> (10 Juli 2026), dan tanggapan HLTF-EI (19 Agustus 2026).
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan Ketahanan Fiskal terkait penerimaan negara	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Menko Perekonomian serta disebarluaskan kepada stakeholders terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *capacity building* dan *focus group discussion* (FGD) dalam rangka pembinaan peningkatan kemampuan analisa perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal, terutama yang berhubungan dengan dinamika ekonomi terkini.
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan perkembangan ekonomi terkini dan rekomendasi kebijakan ketahanan fiskal kepada Menko Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya rapat dilaksanakan menggunakan *zoom meeting* dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi para pegawai di lingkup Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, penyimpanan dan dokumen serta keperluan administrasi persuratan menggunakan e-dokumen sehingga seluruh staf di asdep EMF dapat bekerja secara *real time*, efektif dan efisien.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan informasi dan koordinasi terkait implementasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal secara langsung, karena tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh unit lain.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data-data ekonomi terkini untuk disajikan sebagai bahan analisis kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan IV 2026.
2. Menghasilkan dan menerbitkan dokumen rekomendasi analisis kebijakan terkait diagnosis ekonomi makro dan ketahanan fiskal secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan melakukan survey pelayanan

ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan meliputi: ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*), kehandalan dalam pelayanan (*reliability*), sarana dan prasarana fisik (*tangible*), kepastian dalam pelayanan (*assurance*), dan sikap dalam pelayanan (*empati*); dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan meliputi: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang perekonomian, dan pengawalan program prioritas nasional. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi

$$\text{Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Jumlah dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target 3 atau “puas” tahun 2026 ditetapkan untuk memastikan bahwa penerima layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai harapan. Adapun target triwulan sebesar 3 dari 4, atau setidaknya dapat mempertahankan capaian triwulan-triwulan sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal mencapai telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	Puas (3 dari 4)	Puas (3 dari 4)	100%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan *cascading direct* dari Indikator Indeks Kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan target tahun 2026 sebesar Puas (3 dari 4). Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal ini diharapkan mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

terkait puas terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan.

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang tercapai pada triwulan III didorong oleh koordinasi yang efektif antar pegawai di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan stakeholder terkait. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian bidang ekonomi makro dan fiskal masih terus dilaksanakan, maka diprediksikan indeks kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi. Dengan mempertahankan koordinasi yang baik tersebut, diperkirakan target tahunan akan tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak lanjut hasil survey tahap I (Triwulan II) dan identifikasi masukan sebagai evaluasi Survey kepuasan layanan Tw II	Terlaksana	Telah dilaksanakan tindak lanjut hasil survey tahap I (Triwulan II) dan identifikasi masukan sebagai evaluasi Survey kepuasan layanan Tw II
2.	Persiapan Pelaksanaan Survei Tahap 2 Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Terlaksana	Telah dilaksanakan Persiapan Pelaksanaan Survei Tahap 2 Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan *Google Form* sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp345.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya di triwulan IV tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

(1) keterbatasan waktu dalam penyusunan kegiatan, (2) hasil survei yang belum dapat segera ditindaklanjuti, dan (3) tingginya tingkat kesibukan responden sehingga memengaruhi ketepatan waktu pengisian survei.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mendukung pencapaian target kinerja pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah perbaikan, yaitu menyusun perencanaan kegiatan yang lebih matang melalui penyusunan timeline secara rinci, membangun mekanisme tindak lanjut hasil survei yang lebih terstruktur, serta memberikan fleksibilitas waktu pengisian survei dalam rentang periode tertentu agar tingkat partisipasi responden dapat meningkat.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional merupakan sasaran kegiatan perspektif Learning and Growth yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif *Learning and Growth* level ke deputian yakni Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal

Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sebagai berikut:

Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2026	• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI • Pengisian <u>Survey</u> Penilaian Integritas (SPI)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal tahun 2026 yang berpedoman pada manual IKU. Untuk target capaian pelaksanaan renaksi RB tahun 2025 didasarkan pada dokumen manual IKU yang telah disepakati bersama yaitu sebesar 85%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 60% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi TW III 2026	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	92%	60%	100%

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan cascading direct dari indikator persentase pemenuhan

dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan RB Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Sampai dengan laporan ini disusun, pemenuhan dokumen bukti pelaksanaan RB telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang disusun bersama. Terdapat lima inisiatif strategis pada Triwulan III yang mendasari pemenuhan dokumen pelaksanaan RB, antara lain:

- a) Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja
- b) Penyusunan Matriks Manajemen Risiko
- c) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
- d) Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026
- e) Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI

Kelima inisiatif strategis tersebut didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, inisiatif strategis ini dipetakan berdasarkan jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung pada level keasdepan. Pada triwulan III tahun 2026, fokus pelaksanaan RB dilakukan pada inisiatif (1) terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja; (2) terlaksananya Penyusunan Matriks Manajemen Risiko; (3) terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; (4) terlaksananya Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026; dan (5) terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal, berbagai inisiatif strategis telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pelayanan administrasi.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan laporan diawali dengan pengumpulan data realisasi kinerja dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dilanjutkan dengan proses verifikasi, analisis capaian indikator kinerja, identifikasi faktor pendukung dan kendala, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi yang mendukung pengambilan keputusan serta memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada aspek perencanaan, penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 dilakukan bersama unit terkait, dan usulan revisi disampaikan kepada Sekretaris Deputi melalui Nota Dinas Nomor PR.04.01/111/D.II.M.EKON.6/07/2026 tanggal 23 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor PR.04.01/143/D.II.M.EKON.6/09/2026 tanggal 21 September 2026. Pembahasan didukung One-on-One Meeting Pembahasan Hasil Penelitian KAK dan RAB dalam rangka Penyusunan RKA-K/L TA 2027 (22 Juli 2026) dan Rapat Pembahasan dan Konfirmasi Usulan Renja K/L (9 September 2026).

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI terus didorong sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan aplikasi dilakukan dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik, mulai dari proses surat masuk, surat keluar, disposisi, persetujuan dokumen, hingga pengarsipan. Penerapan SRIKANDI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat alur koordinasi,

memperkuat akuntabilitas pengelolaan dokumen, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Sampai dengan akhir triwulan III Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan III, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal			
No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Dilaksanakan pada Triwulan III-2026 melalui pengumpulan data capaian kinerja, verifikasi, analisis indikator kinerja, penyusunan narasi evaluasi, serta finalisasi laporan. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal berkoordinasi bersama unit terkait.
2.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Dilaksanakannya TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026. Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III - 2026 di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal.
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan III disusun pada [7–9 Oktober 2026] di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal.
4.	Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026	Terlaksana	Usulan revisi disampaikan melalui ND Nomor PR.04.01/111 (23 Juli 2026) dan ND Nomor PR.04.01/143 (21 September 2026)
5.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Penggunaan SRIKANDI secara berkelanjutan pada Juli–September 2026 untuk pengelolaan surat masuk dan keluar, nota dinas, disposisi, persetujuan, dan pengarsipan naskah dinas elektronik di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

1. Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*) sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
2. Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan *cloud* sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu: (1) Revisi Renja memerlukan dua kali penyampaian usulan (Juli dan September) dengan sinkronisasi bersama Sekretariat Deputy dan unit terkait, sehingga penyelesaian TOR dan RAB membutuhkan waktu lebih lama. (2) Keterbatasan waktu pelaksanaan akibat tingginya beban kerja dan pelaksanaan tugas lain yang bersifat prioritas. (3) Proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan masih memerlukan koordinasi serta sinkronisasi dengan unit kerja terkait, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian. (4) Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya optimal sehingga masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan administrasi naskah dinas secara elektronik.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu: (1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait untuk mempercepat proses penyusunan, revidi, dan penyelesaian dokumen. (2) Menyusun jadwal dan timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi guna memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. (4) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui peningkatan kepatuhan penggunaan naskah dinas elektronik serta pendampingan bagi pengguna apabila diperlukan.

Jakarta, 8 Oktober 2026

Plt. Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal



Siti Wahyuningrum

NIP 197903252000122001